

BRIEF OVERVIEW

EVALUASI RENSTRA: MENYELARASKAN IKU KOMPONEN DENGAN IKU KEMENTERIAN

Oleh:
Kundiyarto Prodjotaruno
Founder StarCo Consulting Group

Jakarta, Februari 2019

PROFIL FASILITATOR



Kundiarto Prodjotaruno, adalah konsultan dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang perencanaan strategis, sumber daya manusia, dan manajemen kinerja. Ia telah banyak membantu organisasi publik di lingkungan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Ia bersama tim sering membantu beberapa proyek konsultasi dalam bidang Laporan Kinerja, Sistem Manajemen Kinerja, Renstra, Analisis Jabatan, Laporan Hasil Analisis Beban Kerja, Penyusunan Standar Kompetensi Teknis, dll.

Beberapa instansi yang pernah dibantu antara lain adalah Kementerian PUPR, BPOM, Mahkamah Konstitusi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Badan Informasi Geospasial, BP BATAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Kota Dumai, Pemerintah Kota Tangsel, Kementerian Hukum dan HAM, dll.

Klik bit.ly/gambar-apa

AGENDA

- **PENGANTAR**
- IKU SEBAGAI INDIKATOR RENSTRA
- REVIEW IKU KOMPONEN BERDASARKAN IKU KEMENTERIAN
- TEKNIK MENYUSUN IKU KOMPONEN YANG SELARAS DENGAN IKU KEMENTERIAN

REFERENSI PERATURAN PENYUSUNAN RENSTRA

1

UU No. 25/2004
tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional

2

PP 90/2010
tentang
Penyusunan
Rencana Kerja
dan Anggaran
Kementerian
Negara/
Lembaga (RKA-
KL)

3

Permendagri
No. 43/2015
tentang
Organisasi dan
Tata Kerja
Kemendagri
sebagaimana
diubah dengan
Permendagri
No. 8 Tahun
2018 tentang
Struktur
Organisasi dan
Tata Kerja
Kemendagri

4

PP 39/2006
tentang Tata
Cara
Pengendalian
dan Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan

5

Peraturan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
Nomor 5 Tahun
2014 tentang
Pedoman
Penyusunan
dan Penelaahan
Rencana
Strategis
Kementerian/
Lembaga 2015-
2019

6

Peraturan
Menteri PAN
dan RB No.
PER/09/M.PAN/
2007 tentang
Pedoman
Umum
Penetapan IKU
di Lingkungan
Instansi
Pemerintah

7

Peraturan
Menteri PAN
dan RB No.
PER/20/M.PAN/
11/2008
tentang
Petunjuk
Penyusunan
IKU

DEFINISI EVALUASI (OECD, 2010)

Proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program.

Sebuah penilaian yang obyektif dan sistematis terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung ataupun yang telah diselesaikan.

BEBERAPA DEFINISI OPERASIONAL PADA RENSTRA (PERMEN PPN 5/2014)

Sasaran Program (*Outcome*) adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis Kementerian/Lembaga yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*Output*).

Sasaran Kegiatan (*Output*) adalah keluaran (*output*) yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa.

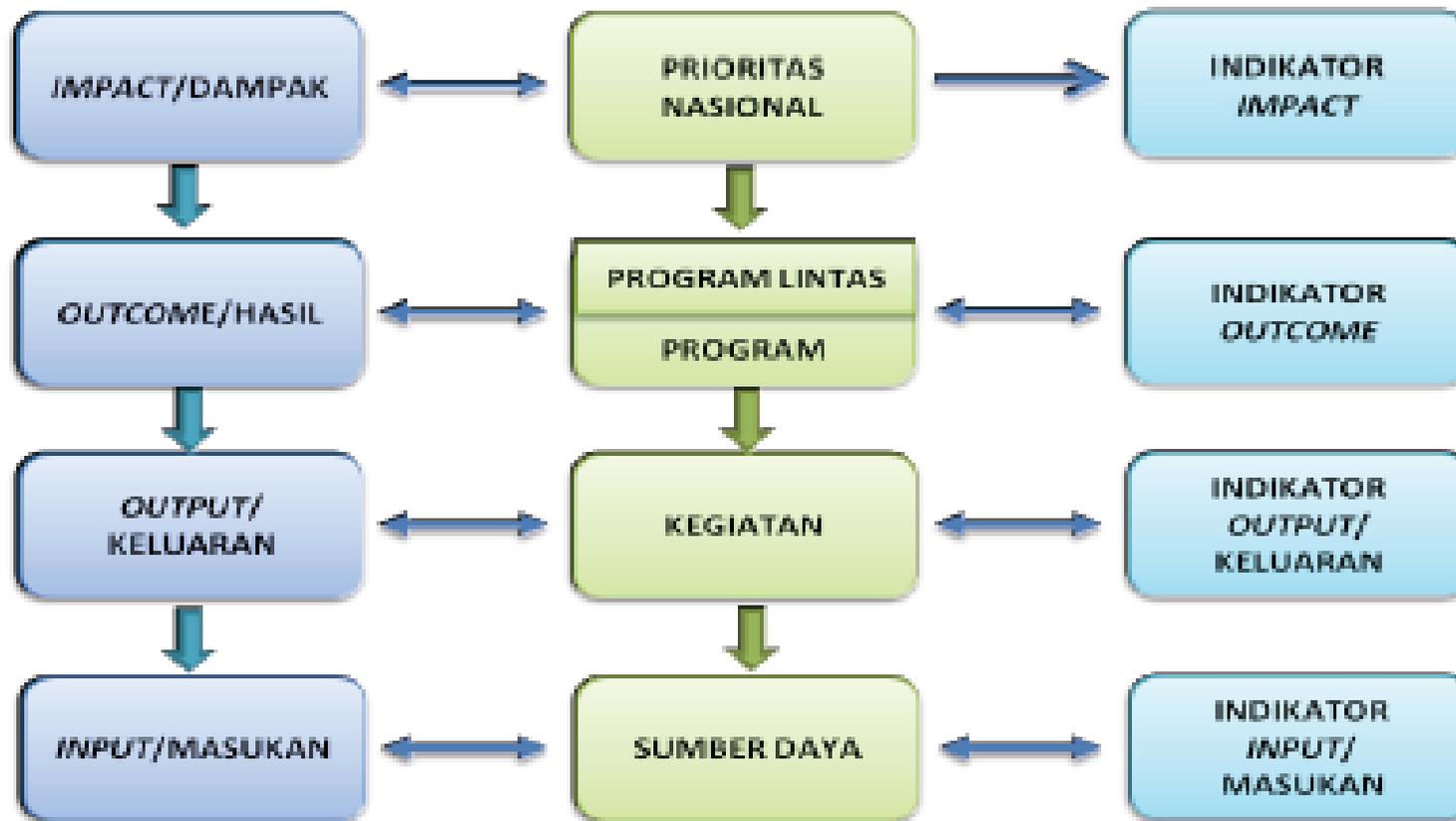
Input adalah segala sesuatu yang digunakan dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*).

Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategi Kernenterian /Lembaga.

Indikator Kinerja Program adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan.

STRUKTUR KEBIJAKAN DAN KINERJA PEMBANGUNAN RPJMN 2015-2019

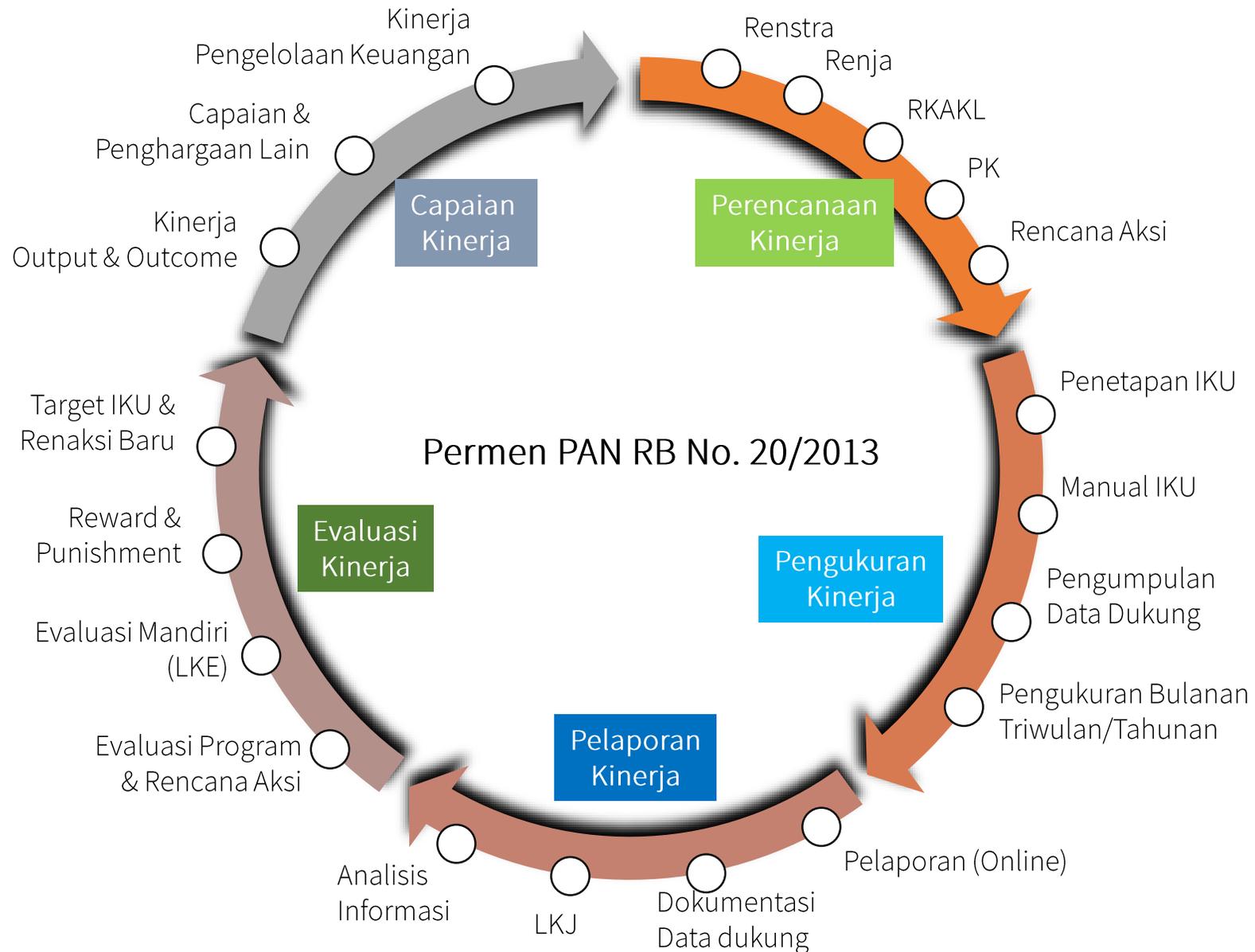


Sumber: Pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019, Bappenas, 2014.

HIRARKIS INPUT, OUTPUT, HASIL, MANFAAT, DAMPAK



Siklus Pengelolaan Kinerja



AGENDA

- PENGANTAR
- **IKU SEBAGAI INDIKATOR RENSTRA**
- REVIEW IKU KOMPONEN BERDASARKAN IKU KEMENTERIAN
- TEKNIK MENYUSUN IKU KOMPONEN YANG SELARAS DENGAN IKU KEMENTERIAN

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

- Mengandung dua pengertian: **“indikator”** dan **“kinerja”**
- Indikator adalah data statistik dan hal yang normative yang menjadi perhatian kita yang membantu kita dalam membuat penilaian ringkas, komprehensif dan berimbang terhadap kondisi-kondisi atau aspek- aspek penting dari suatu masyarakat (Departemen Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan, Arnerika Serikat, 1969)
- Indikator adalah variabel yang rnernbantu kita dalam mengukur perubahan-perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung (WHO, 1981),
- Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasikan atau memberi petunjuk kepada kita suatu keadaan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan (Green, 1992)
- Indikator adalah suatu ukuran tidak langsung dari suatu kejadian atau kondisi. Misalnya bayi berdasarkan umur adalah indikator bagi status gizi bayi (Wilson Sapanuchart, 1993)
- Kinerja adalah **unjuk kerja** dan **prestasi kerja** atau **hasil kerja** yang diwujudkan dalam melakukan suatu kegiatan atau program atau mencapai tujuan dan sasaran tertentu.
- Kinerja adalah upaya dalam mencapai hasil dan capaiannya (*accomplishment*).
- Kinerja adalah unjuk kerja, prestasi kerja, tampilan hasil kerja, capaian dalam memperoleh hasil kerja, tingkat kecepatan/efisiensi/produktivitas/efektivitas dalam mencapai tujuan. Jadi kinerja merupakan **state of condition** dari suatu pelaksanaan kerja dalam mencapai sesuatu yang diinginkan (tujuan, sasaran, hasil yang diinginkan, kondisi yang diinginkan, perubahan yang diinginkan).
- Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

PENGETERIAN INDIKATOR KINERJA

Berdasarkan pengertian-pengertian atau definisi-definisi di atas, maka **“indikator kinerja”** dapat dipahami seperti di bawah ini:

- Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan **alat ukur kinerja** atau yang dicapai.
- Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang **“menggambarkan”** tingkat pencapaian suatu **kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan**. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.

- Indikator kinerja adalah sesuatu yang **mengindikasikan terwujudnya** kinerja yang diinginkan.
- Indikator kinerja adalah **ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui** perkembangan upaya dalam mencapai hasil dan hasil kerja yang dicapai

Peraturan Menteri PAN dan RB No. PER/20/MENPAN/11/208 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan IKU

AGENDA

- PENGANTAR
- IKU SEBAGAI INDIKATOR RENSTRA
- **REVIEW IKU KOMPONEN BERDASARKAN IKU KEMENTERIAN**
- TEKNIK MENYUSUN IKU KOMPONEN YANG SELARAS DENGAN IKU KEMENTERIAN

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN

I. Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara

1. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa

2. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas

II. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan di daerah

3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

5. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di daerah

III. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah

6. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif

IV. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa

7. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelayanan masyarakat

V. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya

8. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan

9. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintahan dalam negeri

VI. Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri

10. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri

11. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional

12. Meningkatkan kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi

SASARAN STRATEGIS DAN IKU KEMENTERIAN

1 Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa

1. Jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam).
2. Jumlah konflik berlatar belakang isu SARA

3 Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

1. Tingkat kualitas tata kelola Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan pada daerah otonom baru.
3. Jumlah Perda bermasalah.
4. Penataan kelembagaan dan Kepegawaian perangkat Daerah sesuai PP 18 Tahun 2016.
5. Persentase kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah.

5 Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di daerah

- Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah

7 Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelayanan masyarakat

1. Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik.
2. Jumlah desa dengan tatakelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel

9 Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional

1. Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna pusat.
2. Penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada serentak.

11 Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri

1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri.
2. Nilai penegakan integritas bebas korupsi Kemendagri dan Pemerintah Daerah.

2 Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas

1. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
2. Persentase peristiwa konflik belatar belakang pemilu dan pilkada;

4 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

1. Persentase penerapan SPM di Daerah (Prov/Kab/Kota).
2. Persentase daerah yang memenuhi pelayanan dasar.
3. Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang prima.
4. Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM.
5. Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM.
6. Persentase Pemerintah Daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik.

6 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif

1. Persentase daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan.
2. Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu.
3. Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu.
4. Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual.

8 Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan

1. Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat.
2. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran

10 Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintahan dalam negeri

1. Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental.
2. Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap Etos Kerja Alumni.
3. Peningkatan kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM

12 Meningkatkan kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi

SASARAN PROGRAM DAN SASARAN KEGIATAN ADWIL (RENSTRA 2015-2019)

SASARAN PROGRAM

Meningkatnya konsolidasi dan koordinasi kebijakan penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan kerja sama daerah, serta penataan wilayah administrasi dan kawasan (kawasan khusus dan kawasan perkotaan), dan batas antar negara

Meningkatnya standardisasi dan kualitas implementasi teknis kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat serta pencegahan dan penganggulangan bencana dan bahaya kebakaran

SASARAN KEGIATAN

Peningkatan penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama daerah, pelayanan publik, dan pembinaan kecamatan

Peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat

Peningkatan penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi

Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar yang dikembangkan

Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan dalam upaya pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran

Peningkatan dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN, SASARAN PROGRAM DAN SASARAN KEGIATAN ADWIL (RENSTRA 2015-2019)

SASARAN STRATEGIS

SASARAN PROGRAM

SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

Menguatnya peran gubernur sebagai wakil pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah

Meningkatnya konsolidasi dan koordinasi kebijakan penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan kerja sama daerah, serta penataan wilayah administrasi dan Kawasan (kawasan khusus dan kawasan perkotaan), dan batas antar negara

Meningkatnya standardisasi dan kualitas implementasi teknis kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat serta pencegahan dan penganggulangan bencana dan bahaya kebakaran

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

Menguatnya peran gubernur sebagai wakil pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah

Peningkatan penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama daerah, pelayanan publik, dan pembinaan kecamatan

Peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat

Peningkatan penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi

Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar yang dikembangkan

Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan dalam upaya pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran

Peningkatan dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KEMENTERIAN YANG MENJADI TUGAS ADWIL (RENSTRA 2015-2019)

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target		Unit Pelaksana
			2015	2019	
Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan di daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang prima	34 provinsi	34 provinsi dan 204 kab/kota	ADWIL
		Penyediaan layanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum sesuai SPM	20%	60%	ADWIL
		Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM	10%	50%	ADWIL
	Menguatnya peran gubernur sebagai wakil pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Persentase kinerja peran gubernur sebagai wakil pemerintah	50% berkinerja baik	70 % berkinerja baik	ADWIL

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DITJEN ADWIL

Terwujudnya pembinaan administrasi kewilayahan dalam memperkuat NKRI

1. Memperkuat kerukunan nasional melalui persatuan dan kesatuan nasional dalam kerangka NKRI;
2. Memfasilitasi terwujudnya penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah melalui pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Gubernur sebagai wakil pemerintah, pelaksanaan azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, peningkatan kerjasama antar daerah, peningkatan peran kecamatan serta mewujudkan terciptanya peningkatan kualitas pelayanan publik;
3. Memfasilitasi penyelenggaraan kewenangan daerah di kawasan khusus dan kawasan perkotaan, penyelesaian sengketa pertanahan dan mewujudkan kepastian hukum batas wilayah negara dan peningkatan kerjasama sosial, ekonomi dan budaya antar negara yang berbatasan dengan NKRI ;
4. Memfasilitasi terciptanya ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan hak-hak sipil;
5. Memfasilitasi penyelenggaraan toponimi dan penegasan batas wilayah administrasi pemerintahan;
6. Memfasilitasi penyelenggaraan manajemen penanggulangan bencana dan kebakaran; dan
7. Mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Meningkatnya konsolidasi dan koordinasi kebijakan penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan kerja sama daerah, serta penataan wilayah administrasi dan kawasan (kawasan khusus dan kawasan perkotaan), dan batas antar negara

Meningkatnya standardisasi kualitas implementasi teknis kebijakan bidang pol pp linmas serta pencegahan dan penganggulangan bencana dan bahaya kebakaran

SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR PROGRAM ADWIL (RENSTRA 2015-2019)

Meningkatnya konsolidasi dan koordinasi kebijakan penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan kerja sama daerah, serta penataan wilayah administrasi dan kawasan (kawasan khusus dan kawasan perkotaan), dan batas antar negara

No.	Indikator Kinerja Program
1.1.	Prosentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
1.2.	Penerapan pelayanan publik di daerah
1.3.	Tertibnya penataan wilayah administrasi daerah
1.4.	Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat

Meningkatnya standardisasi kualitas implementasi teknis kebijakan bidang pol pp linmas serta pencegahan dan penganggulangan bencana dan bahaya kebakaran

No.	Indikator Kinerja Program
2.1.	Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal)
2.2.	Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal)

SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Klik bit.ly/evaluasi-adwil

AGENDA

- PENGANTAR
- IKU SEBAGAI INDIKATOR RENSTRA
- REVIEW IKU KOMPONEN BERDASARKAN IKU KEMENTERIAN
- ROMENDASI PENGEMBANGAN IKU KE DEPAN
- **TEKNIK MENYUSUN IKU KOMPONEN YANG SELARAS DENGAN IKU KEMENTERIAN**

METODE MENURUNKAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA

Adopsi Langsung

Lingkup Dipersempit

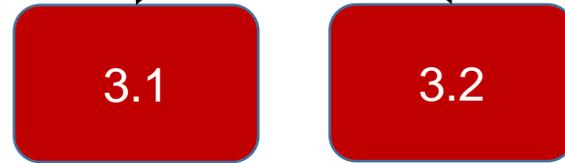
Komponen Pembentuk

Susun Baru

LEVEL ATASAN



LEVEL BAWAHAN



METODE MENURUNKAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA

Adopsi Langsung

Langsung menurunkan Sasaran Strategi, KPI dan Target dari atasan

Lingkup Dipersempit

Mempersempit lingkup sesuai dengan bidang masing-masing.

Komponen Pembentuk

Memisahkan Sasaran Strategi atau KPI berdasarkan komponen pembentuk pada masing-masing bagian.

Buat baru

Membuat Sasaran Strategi, KPI dan Target yang baru.

SEKIAN